



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TVRI STASIUN SULAWESI BARAT
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TENTANG
PENGUNAAN SARAN PENDUKUNG TRANSMISI MAMUJU TENGAH**

Nomor : 007.3/4/VI/2026
Nomor : 01/TK.01.03/II.28/VI/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-06-2026), bertempat di Mamuju Tengah kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. MAHYAR

: Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Barat, berkedudukan di Jl. TVRI, Komplek Perkantoran Rangas, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 310 Tahun 2024 tentang Rotasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TVRI Stasiun Sulawesi Barat disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. HAJAI

: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah, berkedudukan di Tobadak, Jl. Daeng Maccirinnae, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 821.22.1/06/Eselon-II-b/XII/2025 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan dalam Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Eselon II-B dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	
Pihak II	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini ini disebut dengan PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah TVRI Stasiun Sulawesi Barat yang memiliki kebijakan dalam pelayanan publik melalui penyiaran televisi secara teresterial dan media sosial ;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah yang berperan secara aktif dalam memberikan pelayanan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dengan memanfaatkan internet dan media teknologi;

Dasar Hukum yang dipertimbangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan kesepakatan dan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan sarana pendukung transmisi Oleh PIHAK PERTAMA pada lokasi yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan layanan penyiaran publik TVRI agar dapat menjangkau masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dan sekitarnya.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Peminjaman gedung Studio Radio atau ruangan untuk penempatan perangkat server dan perangkat transmisi milik PIHAK PERTAMA.
- (2) Penggunaan menara (tower) milik PIHAK KEDUA untuk pemasangan antena dan perangkat pendukung transmisi TVRI ;
- (3) Penambahan daya listrik yang diperlukan untuk operasional perangkat transmisi TVRI;
- (4) Penyediaan fasilitas pendingin ruangan (Air Conditioner/AC) untuk menjaga kestabilan suhu ruang server dan perangkat transmisi ;
- (5) Pengaturan biaya operasional pada saat penggunaan tenaga listrik yang timbul dari operasional perangkat transmisi TVRI ditanggung oleh PIHAK

Pasal 3
HAH DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak :

- (1) Menggunakan ruang server yang disediakan PIHAK KEDUA ;
- (2) Menggunakan tower milik PIHAK KEDUA untuk pemasangan antena dan perangkat transmisi ;
- (3) Memperoleh akses yang memadai untuk kegiatan instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat transmisi ;
- (4) Mendapatkan dukungan teknis dan koordinasi dari PIHAK KEDUA terkait penggunaan sarana pendukung.

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- (1) Menempatkan perangkat sesuai Standar teknis dan keselamatan yang berlaku;
- (2) Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban area yang digunakan ;
- (3) Bertanggung jawab atas seluruh perangkat milik PIHAK PERTAMA yang ditempatkan pada lokasi kerjasama ;
- (4) Menanggung dan membayar biaya operasional penggunaan listrik yang digunakan oleh perangkat transmisi TVRI ;
- (5) Melakukan pemeliharaan dan perawatan perangkat milik PIHAK PERTAMA ;
- (6) Mematuhi ketentuan keamanan dan tata tertib lokasi yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HAH DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak :

- (1) memperoleh informasi terkait kegiatan operasional perangkat transmisi TVRI;
- (2) melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas yang dipinjamkan;
- (3) menerima pembayaran biaya operasional listrik dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang disepakati.

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- (1) menyediakan ruang server atau gedung (studio Radio) yang layak untuk penempatan perangkat transmisi TVRI;
- (2) memberikan izin penggunaan tower untuk pemasangan antena dan perangkat transmisi;
- (3) memfasilitasi penambahan daya listrik sesuai kebutuhan teknis yang telah disepakati PARA PIHAK;

- (4) memfasilitasi pemasangan dan penggunaan AC pada ruang server;
- (5) memberikan akses kepada petugas PIHAK PERTAMA untuk kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat.

Pasal 5

PENGUNAAN GEDUNG DAN RUANG SERVER

- (1) PIHAK KEDUA meminjamkan ruang atau gedung yang berada pada lokasi transmisi untuk digunakan sebagai ruang server dan ruang pendukung perangkat transmisi TVRI;
- (2) Penggunaan ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengalihkan hak kepemilikan aset kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menjaga kondisi ruangan selama masa penggunaan.

Pasal 6

PENGUNAAN TOWER

- (1) PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan tower yang berada pada lokasi transmisi;
- (2) Pemasangan antena, feeder, perangkat transmisi, dan perangkat pendukung lainnya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai standar teknis dan keselamatan;
- (3) Segala kerusakan pada perangkat milik PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PENAMBAHAN DAYA LISTRIK DAN FASILITAS AC

- (1) Dalam rangka mendukung operasional perangkat transmisi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penambahan daya listrik sesuai kebutuhan teknis;
- (2) PIHAK KEDUA memfasilitasi proses administrasi dan penyediaan sarana pendukung penambahan daya listrik pada lokasi transmisi;
- (3) PIHAK KEDUA menyediakan atau mengizinkan pemasangan AC pada ruang server guna menjaga suhu operasional pe
- (4) rangkat transmisi.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama untuk memastikan efektivitas penggunaan sarana pendukung transmisi.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak terjadi kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Peradilan Negeri sesuai kompetensi relatifnya para PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak-hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama, termasuk antara lain peperangan, peraturan Pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- (2) Dalam hal terjadi suatu hal memaksa (*Force Majeure*), maka pihak yang bersangkutan/berkepentingan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan dimaksud, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak-hak dan kewajiban satu sama lain secara musvawarah.

Pasal 12
PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala biaya dan risiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK;
- (2) Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum* atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ikatan kerjasama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikianlah, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.



PIHAK KESATU,

